

LIVING OF DEMOCRACY: RAGAM MODEL EMOTICON POLITISI INDONESIA DI RUANG PERCAKAPAN DIGITAL

Febrian Hidayat¹, Abdullah Khusairi²

^{1,2}UIN Imam Bonjol Padang

febrianhidayat6204@gmail.com¹, abdullahkhusairi@uinib.ac.id²,

ABSTRACT; *Good democratic politics is needed to realize the sovereignty of a nation led by a people or a government. Democracy ensures that all citizens have equal rights in equality of decision making and voicing their rights (Astawa 2017). In achieving a good democracy there is a political path that must be traversed. In politics there is room for conversation. Today a digital conversation space has been provided to communicate and provide information. Everyone is free to express and convey their opinions. However, this is not the same as someone who must maintain neutrality in carrying out state duties. An ASN in the conversation room must maintain ethics in the digital conversation room. This etiquette takes the form of emojis as a form of not being involved in the campaign. Because in reality an ASN must act neutral and clean during the campaign and election period. This, through emojis, can be described as support for the candidate you want to win. The aim of the research is to find out which emojis are prohibited. This writing uses a qualitative method with a framing analysis approach. Because in looking for a variety of emojis, the author needs materials from online media. The results of this research show that each emoji has its own meaning and has an interpretation according to the political context of the situation at that time. There is a need to be careful when using emojis as symbols of expression, especially for ASN.*

Keywords: *Politics, Democracy, Emoji, Media Online.*

ABSTRAK; Politik demokrasi yang baik diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan suatu bangsa yang dipimpin oleh rakyat atau suatu pemerintahan. Demokrasi menjadikan semua warga mendapatkan hak yang sama dalam kesetaraan pengambilan keputusan dan menyuarakan haknya (Astawa 2017). Dalam mencapai demokrasi yang baik terdapat jalan politik yang harus dilalui. Di dalam politik inilah terdapat ruang percakapan. Hari ini telah disediakan ruang percakapan digital untuk berkomunikasi dan memberi informasi. Semua orang bebas berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Namun, tidak sama halnya dengan seorang yang harus menjaga netralitas dalam menjalankan tugas negara. Seorang ASN dalam ruang percakapan harus ada etika yang dijaga dalam ruang percakapan digital. Etika ini berupa emoji sebagai bentuk tidak terlibat dalam kampanye. Karena sejatinya seorang ASN harus bersikap netral dan bersih selama masa kampanye dan pemilu. Hal tersebut melalui emoji sudah bisa menggambarkan sebagai dukungan kandidat calon yang ingin dimenangkan. Tujuan penelitian agar mengetahui emoji apa saja yang terlarang. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing. Karena dalam mencari ragam emoji penulis membutuhkan bahan bahan dari media online.

Hasil dari penelitian ini bahwa setiap emoji memiliki makna tersendiri dan memiliki penafsiran sesuai dengan konteks politik di keadaan pada masa itu. Perlunya kehati-hatian dalam menggunakan emoji sebagai simbol mengekspresikan terkhusus untuk ASN.

Kata Kunci: Politik, Demokrasi, Emoji, Media Online.

PENDAHULUAN

Politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki banyak makna. Pertama, pengetahuan tentang ketatanegaraan, atau kenegaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan mengenai suatu pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Ketiga cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah (Ismail 2017). Sementara itu, Prof. Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Ilmu Politik" menjelaskan bahwa politik memiliki arti berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Politik dalam demokrasi hanya mungkin terjadi jika rakyat memperjuangkannya setelah kekuasaan monarki dan oligarki dirasa tidak cukup menyelesaikan masalah kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berekspresi, dan berbagai kebebasan lainnya. Itu adalah sistem politik yang tidak berjalan. Seperti yang terjadi hari ini, Indonesia sedang menghadapi demokrasi politik pada kandidat calon presiden 2024.

Demokrasi di Indonesia memiliki beragam tantangan yang dihadapi dari masa ke masa. Ada beberapa kemajuan dan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Salah satu bukti kemajuannya yaitu bertambah dan berkembangnya partai-partai politik di Indonesia yang mengikuti pemilihan umum. Kemudian, kebebasan bersuara dan berpendapat diperbolehkan suatu bentuk kemajuan yang ada dalam demokrasi. Namun, hari ini Indonesia mengalami krisis demokrasi. Karena hal ini belum terjadi secara signifikan, akibatnya masih terlalu kuatnya kelompok yang pro-KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) maupun anti perbaikan (M 2016).

Di tahun 2024, Indonesia sedang memanas dengan adanya pemilihan umum baik itu dari presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD baik itu tingkat provinsi dan tingkat daerah. Tidak hanya itu, akan ada juga pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan pemilihan daerah tingkat kabupaten. Semuanya akan diganti kepemimpinan di tahun 2024.

Di tahun politik ini, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian. Semua orang bebas memilih dan mengkampanyekan pilihan yang mereka kehendaki. Namun, hal ini berbeda

dengan ASN. Mengutip dari website Kompas yang mengeluarkan beritanya berisi “ASN Dilarang Foto Berpose V, Simbol Hati Korea, dan Jempol di Masa Pemilu 2024, ini penjelasan BKN”, berita ini terbit pada tanggal 11 September 2023. Semua ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tergabung dalam ini semuanya wajib bersifat netral dan tidak boleh mengkampanyekan pihak yang mereka pilih.

Teruntuk ASN dan pejabat negara lainnya dilarang mengkampanyekan atau memberi simbol sebagai dukungan terhadap paslon. Telah dijelaskan dalam undang-undang pasal 2 UU no 5 tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”(Pemerintah Pusat 2014). ASN dalam masa pemilu harus bersikap netral dan tidak diperbolehkan memberikan symbol-simbol atau emoji yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon kandidat siapapun itu orangnya.

Memasuki tahun pemilu, politik di Indonesia sedang hangat-hangatnya. Setiap partai akan memperjuangkan calon kandidat presidennya siapa yang berhak duduk di istana negara. Kekacauan mungkin saja terjadi apabila keadaan pemilu ini tidak ditertibkan. Para ASN dan rakyat untungnya bisa bekerja sama hingga kondisi kondusif selama proses kampanye dan pemilu 2024. Situasi ini didukung dengan adanya sosial media dalam berpolitik. Baik itu komunikasi sesama lawan dan kelacaran berjalannya pemilu(Khusairi, Nasir, and Fata 2023). Keadaan warga aman sesuai dengan proses yang telah dilalui dan pejabat-pejabat negara semuanya berjalan dengan normal. Namun, penulis ingin meneliti lebih dalam terhadap simbol-simbol yang dilarang dipakai oleh ASN. Ada apa dengan simbol tersebut, bagaimana pengaruh simbol tersebut dan kenapa simbol itu menjadi terlarang dalam masa pemilu 2024.

Dengan demikian, secara pribadi penulis dan untuk masyarakat umum bisa lebih mengetahui terkait emoji-emoji yang dibolehkan dan dilarang dipakai selama proses pemilu. Agar pemilu berjalan kondusif, aman, dan tertib maka diperlukan kerja samanya. Tanpa maksud menjatuhkan dan menghina maka jadikan pemilu ini sebagai perdamaian di negara republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda pilihan tetapi tetap satu tujuan untuk Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi suatu pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang dengan pengertian, orang akan menciptakan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Dalam hal ini, perlu aturan dengan dukungan dan menjadi dasar dalam kehidupan

negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan seperti yang disebut konstitusi (Noviati 2016).

Politik pada dasarnya ialah suatu fenomena yang berhubungan langsung dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya (Nambo and Puluhuluwa 2005). Seiring dengan itu, hadirnya media massa mempermudah informasi dan komunikasi untuk dunia kerja.

Hari ini, politik sedang maraknya bermain dalam media masa untuk menyebarkan berita kepada masyarakat tentang edukasi politik. Perkembangan media massa sangat gencar ini dibutuhkan banyak orang dan juga dalam hal berpolitik butuh yang namanya media massa (Nur 2021). Salah satu ruang untuk berkomunikasi yaitu hadirnya aplikasi WhatsApp yang merupakan sering digunakan oleh jutaan manusia terkhusus di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan ruang untuk berkomunikasi lebih cepat dan lebih mudah untuk segala hal (Willis, Khusairi, and Yazan 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis framing. Penelitian kualitatif tidak hanya menggunakan logika untuk menganalisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, tetapi juga memfokuskan analisisnya pada proses penalaran deduktif dan induktif (Mukrimaa et al. 2016).

Sementara itu, analisis framing untuk menemukan media yang membingkai suatu peristiwa melalui berita, opini, atau wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif, dengan tujuan mengumpulkan informasi rinci dan nyata, seperti mendeskripsikan gejala yang ada dan mengidentifikasi masalah, atau menyelidiki kondisi dan praktik yang dapat diterapkan (Kartini dkk 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengkaji penggunaan emoticon oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks politik Indonesia, khususnya pada periode pemilu 2024 mendatang. Fokusnya adalah pada etika. Netralitas ASN dalam penggunaan emoji dalam percakapan di ruang digital. Hasil utama ini menunjukkan etika penggunaan emoticon, seorang ASN harus menjaga netralitas dan tidak mendukung calon tertentu melalui emoticon. Hal ini penting untuk mencegah

munculnya bias yang dapat membahayakan integritas ASN.

Penelitian mengidentifikasi setidaknya tujuh emoticon yang dilarang digunakan oleh ASN. Ini termasuk ibu jari, jari telunjuk, dan simbol lain yang dapat diartikan sebagai dukungan politik. Penggunaan emoji tersebut bisa dianggap sebagai bentuk kampanye yang melanggar aturan. Arti emoticon dalam konteks politik mempunyai arti berbeda tergantung konteksnya dan kondisinya. Misalnya, emoji "jempol" bisa diartikan sebagai persetujuan, sedangkan kombinasi jari tertentu bisa melambangkan solidaritas dan dukungan.

Pentingnya kesadaran konteks bagi ASN dan masyarakat perlu memahami dalam konteks penggunaan emoji dalam komunikasi digital, khususnya pada masa pemilu. Salah tafsir atau penggunaan emoji dapat menimbulkan kesalahpahaman dan pelanggaran etika. Media sosial dan aplikasi komunikasi digital seperti WhatsApp berperan penting dalam penyebaran informasi politik. Namun ASN harus berhati-hati agar tidak melakukan aktivitas apa pun yang dapat mengancam netralitasnya.

Penelitian ini menegaskan pentingnya etika dan netralitas dalam penggunaan emoji di ruang percakapan digital oleh ASN. Dengan memperhatikan regulasi dan kondisi yang ada, diharapkan proses demokratisasi Indonesia menjadi lebih fasilitatif dan berkelanjutan. Artikel ini mencerminkan temuan studi ASN yang berfokus pada penggunaan emoticon dalam konteks politik dan tantangan menjaga netralitas dalam pemilu.

Pembahasan

Perkembangan kemajuan dunia hari ini terletak pada digitalisasi. Semua menjadi mudah dan serba praktis hanya melalui dunia digitalisasi. Salah satu bentuk keuntungan digitalisasi ialah untuk berkomunikasi cukup melalui platform yang telah disediakan tanpa harus bertatap muka langsung. Namun, di sisi lain dalam pemakaiannya harus hati hati dan gunakan dengan bijak. Salah satunya selama masa pemilu terkhusus di Indonesia.

Selama masa kampanye pemilu Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersifat netral. Maksud bersifat netral di sini tidak memihak atau tidak cawe-cawe terhadap kandidat calon baik presiden maupun legislatif. Semua yang termasuk dalam ASN ini harus bersikap netral selayaknya bersih tanpa memihak. Dalam hal ini, perlu diperhatikan kode etik ASN selama masa pemilu berlangsung. Sehingga Pemilu bisa berjalan lancar tanpa campur baur dari ASN.

Salah satu sikap ASN dalam masa kampanye pemilu itu harus bersikap tidak berpartisipasi. Hal ini dapat terlihat dari perilaku tidak menjadi peserta kampanye atau menjadi

bagian dari tim pemenangan kandidat tertentu. ASN juga dilarang menggunakan ciri-ciri partai politik atau pejabat untuk mendukung bakal calon kandidat. Kemudian, Imparsialitas berarti tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menguntungkan kandidat. Keputusan di sini bersifat murni dan bersih dari kampanye politik (Sugiarto 2016).

Selain itu, tidak terlibat kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kandidat calon tertentu berupa ajakan, pertemuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Selain itu juga tidak membantu menggunakan fasilitas dari negara dengan memanfaatkan jabatan untuk kandidat calon tertentu. Banyak hal yang seharusnya menjadi perhatian bagi kode etik ASN dalam masa kampanye pemilu. Hal ini guna kelancaran dalam kesuksesan terselenggaranya pemilu yang bersifat mandiri, jujur, rahasia, adil, tertib, terbuka, professional, efektif, dan efisien.

Peraturan ASN yang dilarang memberikan simbol atau emoji untuk mengkampanyekan dukungan itu sudah tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang no 5 tahun 2014. Undang-undang itu berisi bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Semua badan yang termasuk dalam ASN artinya harus bersifat netral terkhusus selama masa pemilu. Mereka harus bersikap tanpa berpihak kemanapun. Tidak ada yang mengatas namakan kepentingan pribadi. Dalam hal ini seorang ASN harus mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi.

Mengutip dari website Kompas yang mengeluarkan beritanya berisi “ASN Dilarang Foto Berpose V, Simbol Hati Korea, dan Jempol di Masa Pemilu 2024, ini penjelasan BKN”, berita ini terbit pada tanggal 11 September 2023. Semua ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tergabung dalam ini semuanya wajib bersifat netral dan tidak boleh mengkampanyekan pihak yang mereka pilih. Selain itu, mengutip juga dari ManadoPost.id yang mengeluarkan berita yang berjudul “Hallo PNS, Berikut Larangan Pamer Simbol Emoji di Medsos,” berita ini dinaikkan pada tanggal 6 November 2023. Dari kedua berita ini bahwa terdapat beberapa larangan menggunakan simbol atau emoji bagi ASN dalam media sosial. Terutama dalam masa pemilu, semua ASN harus bersifat netral dan tidak boleh memberikan simbol-simbol atau emoji yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon kandidat baik itu presiden maupun legislatif. Jika didapatkan seorang ASN memberikan emoji terhadap dukungan yang dia inginkan maka akan diberikan sanksi yang tegas.

Dalam hal ini, emoji-emoji yang tidak boleh dipakai oleh ASN yaitu berupa yang mengarahkan kampanye atau dukungan terhadap salah satu kandidat yang dia ingin tujukan. Setidaknya ada tujuh emoji yang menandakan bahwa itu menunjukkan berbau politik untuk mengkampanyekan, diantaranya ada:



Gambar 1.0 ManadoPost.id

Di dalam berita tersebut setidaknya ada tujuh emoji yang terlarang bagi PNS. Berita tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang mengenai emoji-emoji yang terlarang bagi ASN untuk memakainya. Diantaranya, emoji jempol, emoji jari telunjuk dan jempol mengarah ke atas, emoji telunjuk dan jempol mengarah ke samping, emoji jari kelingking dan jari telunjuk, emoji salam lima jari, emoji jari jempol dan jari kelingking, dan terakhir salam metal yaitu ada tiga jari jempol, jari telunjuk dan jari kelingking. Berikut di bawah ini akan dibahas satu persatu emoji dan pengaruhnya dalam dunia politik:



Gambar 1.1 Emojis.Wiki

Gambar ini menunjukkan emoji jempol. Satu jari jempol menunjukkan ke atas dan semua jari tertutup rapat. Tangan kuning dengan jempol ke atas menunjukkan persetujuan atau persetujuan. Emoji diistilahkan dengan emoji “Sah” atau persetujuan terhadap mengenai sesuatu hal.

Menurut istilah ilmu hukum, emoji ini dinamakan *thumbs-up* sebagai tindakan hukum penerimaan dan persetujuan kontrak. Hal ini emoji ini mengekspresikan terhadap sesuatu yang telah diputuskan atau ditetapkan dengan memberikan emoji ini. Oleh karena itu, ketika

menggunakan emoji ini dalam konteks politik, penting untuk mempertimbangkan konteks dan pesan keseluruhannya.



Gambar 1.2 Emoji.Wiki

Gambar ini menunjukkan emoji jari jempol dan jari telunjuk mengarah ke atas. Hanya dua jari tersebut tegak ke atas, selebihnya tertutup rapat. Jari ini menunjukkan sebuah makna dalam mengekspresikan suatu simbol. Emoji ini diartikan sebagai makna persetujuan, positif, dan ada hal negatif atau kecewa. Dengan memberikan atau menunjukkan jari jempol dan jari telunjuk ke atas seperti yang ada itu berarti bisa jadi maknanya hal yang positif atau negatif.

Dilihat dari segi politik, dengan memberikan emoji ini secara tidak langsung bisa dimaknai sebagai dukungan atau persetujuan terhadap kebijakan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat. Tidak hanya itu, emoji ini juga memberikan makna sebagai simbolisasi kesepakatan dalam hal politik. Namun, di sisi lain emoji ini memberikan makna penolakan terhadap oposisi karena ketidakpuasan. Oleh karena itu, ketika menggunakan emoji ini dalam konteks politik, penting untuk mempertimbangkan konteks dan pesan keseluruhannya.



Gambar 1.3 Emoji.Wiki

Gambar ini menunjukkan emoji jari jempol dan jari telunjuk mengarah ke samping. Hanya dua jari tersebut tegak ke samping, selebihnya tertutup rapat. Jari ini menunjukkan sebuah makna dalam mengekspresikan sebagai simbol. Emoji atau simbol ini cara mengartikannya dengan melihat konteks budaya pada zamannya. Makna ini sikap netral atau

toleransi sesama yang lain, bukti solidaritas, dan mengekspresikan pendukung kiri atau kanan yang dia pilih. Namun, emoji ini bisa juga menunjukkan ketidaksukaan dalam kepuasan sistem.

Menurut dunia politik, seseorang orang yang memberikan emoji ini harus memahami konteks budaya dan situasi pada waktu itu. Karena dengan memberikan emoji ini tandanya seseorang itu akan bersifat netral untuk memperjuangkan demokrasi tersebut. Bisa juga dibuktikan sebagai solidaritas dalam politik untuk mempertahankan posisi. Namun, di sisi ekstrem nya emoji ini menunjukkan sikap pemberontak dimana seseorang akan bersikap keras. Keras disini menandakan perlawanan dalam saingan terhadap lawannya. Oleh karena itu, ketika menggunakan emoji ini dalam konteks politik, penting untuk mempertimbangkan konteks dan pesan keseluruhannya.



Gambar 1.4 Emoji.Wiki

Gambar ini menunjukkan emoji jari kelingking dan jari telunjuk tegak ke atas. Hanya dua jari yang tegak dan selebihnya semua jari dalam posisi tertutup. Emoji ini menampilkan keseluruhannya menyerupai kepalan tangan dengan dua jari terjulur ke atas. Emoji sering kali digunakan untuk mengekspresikan emosi rock and roll, heavy metal, atau kegembiraan dan perayaan secara umum. Emoji "kelingking" dan "jari telunjuk", juga dikenal sebagai emoji "dogeza" atau "doa", memiliki arti berbeda bergantung pada konteks politik.

Dalam beberapa konteks politik, emoji kelingking dan jari telunjuk digunakan untuk menyatakan rasa persatuan, kesatuan, dan solidaritas dalam mendukung tujuan atau ideologi tertentu, atau sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan atau kampanye politik. Harapan akan perdamaian atau persatuan emoji ini terkadang digunakan dalam situasi politik yang tegang untuk menyampaikan harapan akan perdamaian, persatuan, atau penyelesaian konflik. Kemudian cara mengungkapkan keinginan rasa hormat atau terima kasih kepada tokoh-tokoh yang dianggap telah memberikan kontribusi penting. Seperti emoji lainnya, penafsiran emoji kelingking dan jari telunjuk bervariasi tergantung konteks dan budaya penggunaannya. Oleh

karena itu, ketika menggunakan emoji ini dalam konteks politik, penting untuk mempertimbangkan konteks dan pesan keseluruhannya.



Gambar 1.5 Emoji.Wiki

Gambar ini menunjukkan emoji lima jari atau istilah lainnya salam lima jari. Semua jari terbuka dan tidak ada yang tertutup. Memiliki jari-jari panjang yang sama dan sedikit melengkung, memberikan tampilan tangan yang rileks dan alami. Secara keseluruhan, emoji ini menyampaikan makna rasa keterbukaan, salam, atau tos.

Dalam dunia politik, hal ini menunjukkan salam keakraban dan salam kehangatan untuk saling solidaritas yang lebih tinggi. Emoji ini bisa juga mempengaruhi suara dalam pemilu dengan mengekspresikan salam lima jari. Simbol kebahagiaan, kesenangan, dan dukungan yang tinggi terhadap kandidat yang diinginkan. Emoji ini sangat mempengaruhi dalam permainan politik. Di sisi lain, orang-orang bisa terpengaruhi baik itu positif maupun negatif. Mengekspresikan emoji ini dengan syarat tidak perlu bersikap keras. Oleh karena itu, ketika menggunakan emoji ini dalam konteks politik, penting untuk mempertimbangkan konteks dan pesan keseluruhannya.



Gambar 1.6 Emoji.Wiki

Gambar ini menunjukkan emoji jari jempol dan jari kelingking tegak. Selain dari dua jari itu dalam keadaan tertutup rapat. Emoji ini dikenal dengan 'call me hand' atau istilah lainnya 'hubungi aku'. Emoji ini untuk mengekspresikan bersikap ramah, baik hati, dan pengertian kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang siapa mereka. Emoji inilah yang memberikan sikap terbuka dan menerima siapapun apa adanya.

Emoji jempol dan kelingking biasanya digunakan dalam kehidupan politik memiliki arti berbeda-beda tergantung konteks penggunaannya. Emoji ini biasanya dipakai untuk menunjukkan persatuan atau solidaritas antar kelompok atau individu. Hal ini mungkin memberikan bukti kepemimpinan yang kuat atau pengakuan terhadap kebijakan yang dipandang positif oleh individu atau kelompok yang menggunakan emoji. Selain itu, emoji ini dapat digunakan sebagai simbol yang mudah dikenali untuk mewakili tujuan atau pesan tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa arti emoji dapat berbeda-beda tergantung konteks dan budaya. Oleh karena itu, ketika menafsirkan emoji ini dalam konteks politik, penting untuk mempertimbangkan pesan keseluruhan dan konteks penggunaannya.



Gambar 1.7 Emoji.Wiki

Gambar ini menunjukkan emoji jari kelingking, jari telunjuk, dan jari jempol. Hanya jari manis dan jari tengah yang berada dalam posisi tertutup. Ketiga jari ini tegak lurus yang memberikan makna ‘love language’ dalam mengungkapkan perasaan yang ada. Secara tidak langsung emoji ini mengisyaratkan tanda cinta yang dalam bahasa Amerika untuk menyatakan “Aku Cinta Kamu”. Emoji yang memiliki makna romantis dalam mengekspresikan.

Ditinjau dari konteks politik, emoji jari kelingking, jari telunjuk dan jari jempol ini digunakan sebagai perasaan yang sedang menjaga hak dan kewajiban yang dianggap penting dalam berpolitik. Hal ini dapat menggambarkan perasaan seseorang yang sedang bahagia, dan mencintai keadaan serta situasi politik tersebut. Jika ada seorang kandidat yang lebih diutamakan maka cukup memberikan simbol yang sesuai untuk mengekspresikan kesenangannya. Selain itu, emoji ini bisa menggambarkan bagaimana situasi dan keadaan yang sedang terjadi baik itu dari segi positif maupun negatif. Oleh karena itu, ketika menafsirkan emoji ini dalam konteks politik, penting untuk mempertimbangkan pesan keseluruhan dan konteks penggunaannya.

Ragam emoji dalam ruang percakapan digital memiliki makna tersendiri dan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi. Dalam penafsirannya, harus berhati-hati lebih agar tidak salah maksud dalam mengartikannya. Di sisi lain bisa bermakna positif

dan di sisi lain bisa bermakna. Setidaknya ada tujuh bentuk emoji yang dilarang bagi ASN untuk menggunakannya. Hal ini guna menjaga kenetralitas seorang ASN dalam bekerja sehari-hari.

Dalam perkembangan era digital, orang-orang untuk berkomunikasi cukup melalui ruang digital yang disediakan platform Whatsapp. Di dalam aplikasi tersebut, setiap orang bebas berkomunikasi yang dia inginkan. Inilah salah satu bentuk kemajuan era globalisasi adanya mempermudah komunikasi melalui aplikasi ruang digital. Namun, kebebasan ini tidak sama halnya dengan ASN. Seorang ASN harus menjaga kenetralitasnya dalam berpolitik. Oleh karena itu, dilarang keras bagi ASN untuk memberikan emoji-emoji atau simbol yang menunjukkan dukungan kepada kandidat calon yang dia ingin memenangkan.

Setidaknya ada tujuh emoji yang dilarang digunakan bagi ASN sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Emoji-emoji tersebut memiliki arti dan makna tersendiri terkhusus dalam berpolitik. Teruntuk pemakaian dalam berpolitik atau beradu argumen sesama lawan akan adanya hasil yang sensitif. Oleh karena itu, dalam pemakaian dan menanggapi emoji-emoji seperti ini harus berhati-dalam menafsirkannya. Sehingga tidak ada yang salah paham dalam penanggapannya

KESIMPULAN

Politik tidak bisa dilepas dari aktifitas kehidupan sehari-hari. Dimana-mana pasti ada yang namanya terjadi politik. Politik sudah menjadi bagian dari kehidupan. Apalagi teruntuk sebuah negara harus ada didalamnya unsur politik. Sebuah negara maju dan menjadi negara berkembang apabila aktifitas politiknya. Gunanya politik di sini untuk menegakkan demokrasi sebuah negara. Demokrasi tanpa politik tidak akan berjalan seutuhnya.

Di era digitalisasi, demokrasi politik sudah bisa diterapkan dengan sebijaknya melalui ruang digital. Tidak hanya itu, untuk memberikan kabar kepada khalayak ramai sekarang bisa melalui media massa atau media online. Media online inilah sebuah ruang terbuka untuk menerima informasi dan segala macamnya. Sehingga semua orang bebas memberikan kabarnya melalui media online. Hal ini sangat dibutuhkan dalam pemerintah untuk mendapatkan informasi dan komunikasi lainnya

Dalam hal ini, seseorang bebas berargumen dan berpolitik hanya melalui media massa. Media online tanpa perlu mengeluarkan uang yang banyak seseorang sudah bisa menyuarakan kebebasannya. Namun, berbeda dengan ASN yang selama masa kampanye berpolitik ada

etika yang dijaga. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa bagi ASN ada beberapa simbol atau emoji yang terlarang untuk dipakai selama masa pemilu. Setidaknya ada tujuh emoji yang terlarang untuk digunakan. Hal ini guna menjaga kenetralitas seorang ASN dan setiap emoji memiliki makna serta arti yang maksudnya untuk mengkampanyekan. Di sinilah hal yang dilarang karena emoji itu sebagai simbol dukungan dalam berkampanye pemilu.

Oleh karena itu, kepada setiap ASN yang terlibat dalamnya agar bersikap hati-hati dalam menjaga etika di era digitalisasi. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan bisa direkam. Pergunakanlah emoji itu sebaik mungkin, karena dibalik emoji tersebut ada makna tersirat yang tafsirannya sesuai dengan keadaan dan situasi. Dengan demikian, ASN tetap netral dan masyarakat juga tertib selama masa pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I Putu Ari. 2017. "Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia." *Universitas Udayana*, 1–11.
- Ismail, Rusfiana Yudi dan Nurdin. 2017. *Dinamika Politik Kontemporer*.
- Kartini dkk. 2020. "Metode Analisis Framing Dalam Media Sosial." *Jurnal Edukasi Nonformal* 3 (2): 142.
- Khusairi, Abdullah, Muhammad Nasir, and Ahmad Khoirul Fata. 2023. "Kemenangan Ideologis Dan Kekalahan Politik Wacana Politik Etnis Minang Dalam Pemilihan Presiden 2014 Dan 2019." *Jurnal Review Politik* 13 (2): 202–29.
- M, H. Nihaya. 2016. "Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia." *Sulesana* 10 (2): 35–49.
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. 2016. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6 (August): 128.
- Nambo, Abdulkadir, and Muhamad Puluhuluwa. 2005. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)." *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21 (2): 262–85.
- Noviati, Cora Elly. 2016. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10 (2): 333.
- Nur, Emilsyah. 2021. "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online." *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* 02: 52.

Pemerintah Pusat. 2014. “UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Undang-Undang*, no. 6. www.djpp.kemendikham.go.id.

Sugiarto. 2016. *Modul Netralitas ASN*. Vol. 4.

Willis, Mardiana, Abdullah Khusairi, and Sheiful Yazan. 2022. “Stiker Whatsapp Gaya Minangkabau: Analisis Semiotika.” *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 8 (2): 180–96.